

Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Sungai Mekong: Kontestasi Kepentingan antara Tiongkok dan Negara-Negara *Lower Mekong*

Vidya Devina Putri^{1*}, Irsyaad Suharyadi¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung

*e-mail : 2216071016@students.unila.ac.id

Abstract

Histori Artikel:

Diajukan:
08/05/2026

Diterima:
02/06/2026

Diterbitkan:
25/06/2026

This study analyzes the dynamics of water resource management in the Mekong River, which has transformed from a center of civilization into an arena for contested interests between countries in the Lower Mekong. Using the concept of Hydro-hegemony by Zeitoun and Warner, this study explores how geographic location influences the water resource management policies of countries in the region. The results show that China and Laos, as upstream actors, utilize their geographic and economic advantages to dominate control of water flows through the construction of hydroelectric dams. This imbalanced relationship creates negative externalities for downstream countries such as Vietnam and Cambodia, including threats to food security and ecosystem stability. These findings confirm that the dynamics of Mekong River management are not only environmental in nature but also closely related to transnational water resource governance and the asymmetry of interests between upstream and downstream actors.

Keywords: Mekong River, Hydro-Hegemony, China, Lower Mekong.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika pengelolaan sumber daya air di Sungai Mekong, yang telah bertransformasi dari pusat peradaban menjadi arena kontestasi kepentingan antara negara - negara Lower Mekong. Menggunakan konsep Hydro-hegemony dari Zeitoun dan Warner, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana posisi geografis memengaruhi kebijakan pengelolaan sumber daya air negara-negara Kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tiongkok dan Laos, sebagai aktor hulu, memanfaatkan keunggulan geografis dan ekonomi mereka untuk mendominasi kontrol aliran air melalui pembangunan bendungan hidroelektrik. Ketimpangan relasi ini menimbulkan eksternalitas negatif bagi negara-negara hilir seperti

Vietnam dan Kamboja, termasuk ancaman terhadap ketahanan pangan dan stabilitas ekosistem. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika pengelolaan Sungai Mekong tidak hanya berdimensi lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya air lintas negara dan asimetri kepentingan antara aktor hulu dan hilir.

Kata Kunci : Sungai Mekong, Hydro-Hegemony, Tiongkok, Lower Mekong

Pendahuluan

Sungai lintas negara merupakan salah satu elemen geografis yang memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber air, pangan, dan transportasi, sungai juga menjadi ruang interaksi antarnegara ketika alirannya melintasi batas-batas teritorial. Dalam konteks tersebut, pengelolaan sumber daya air lintas negara kerap menghadapi tantangan serius akibat perbedaan kepentingan, kapasitas, dan posisi geografis antarnegara yang terlibat. Oleh karena itu, isu pengelolaan sungai lintas negara tidak hanya dipahami sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola sumber daya yang melibatkan relasi kuasa dan kepentingan antarnegara.

Sungai Mekong merupakan obyek yang memiliki nilai geografis dan historiografi penting di wilayah Asia Tenggara. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang ketujuh di dunia dengan panjang 4.800 km yang membentang dari wilayah Tibet hingga ke Laut China Selatan. Sungai ini mengalir 810 ribu km² daratan dan menjadi sumber kehidupan bagi 339 juta jiwa di wilayah Greater Mekong Subregion (SOUTULLO, 2019). Dalam beberapa dekade terakhir, peran Sungai Mekong mengalami transformasi dari sumber ekonomi agrikultur menuju komoditas strategis yang berkaitan erat dengan industrialisasi dan pemenuhan kebutuhan energi regional.

Negara-negara Lower Mekong, yaitu Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam terus mengalami peningkatan kebutuhan energi yang sangat cepat dan diproyeksikan akan semakin meningkat hingga 80 persen pada tahun 2040 (SOUTULLO, 2019). Thailand menjadi konsumen energi terbesar dan masih sangat bersandar pada impor listrik, sedangkan Laos memposisikan negaranya sebagai “Battery of Southeast Asia” melalui pembangunan bendungan besar seperti Xayaburi dan Don Sahong yang mayoritas dibiayai investor Thailand dan Tiongkok (SOUTULLO, 2019). Di sisi hilir, Vietnam menghadapi ancaman serius karena terkikisnya jumlah sedimen hingga 97 persen. Kondisi ini membuat tanah

semakin tidak subur dan meningkatkan risiko masuknya air laut (Asean Post, 2025).

Dinamika pengelolaan sumber daya air di Sungai Mekong telah menjadi kontestasi kepentingan antara Tiongkok dan Negara-Negara Lower Mekong. Ketegangan kepentingan tersebut semakin meningkat dengan adanya pembangunan hydropower di hulu yang mengubah arus air, mengganggu ekosistem, serta mengancam mata pencaharian jutaan penduduk yang mengandalkan penghasilannya pada perikanan, hortikultura, serta pertanian. Ancaman tersebut semakin nyata setelah terjadinya penurunan ekstrem muka air dari 8 meter menjadi 1,5 meter pada tahun 2019 yang terdampak dari akibat operasi bendungan Jinghong di Tiongkok dan Xayaburi di Laos (Panu, 2019). Kompleksitas konflik yang berkaitan dengan sumber daya sungai Mekong semakin rumit karena keterlibatan Tiongkok yang menganggap Mekong sebagai koridor strategis dalam Belt and Road Initiative (Parameswaran, 2019).

Dalam konteks tata kelola sungai lintas negara, Mekong River Commission (MRC) dibentuk sebagai mekanisme kerja sama regional yang bertujuan mengoordinasikan pengelolaan Sungai Mekong di antara negara-negara Lower Mekong. Namun, efektivitas MRC dalam merespons dinamika pembangunan bendungan di wilayah hulu dan tengah sungai masih menghadapi keterbatasan yang signifikan. Keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya daya ikat institusional, mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat konsultatif, serta absennya Tiongkok sebagai anggota penuh dalam struktur kelembagaan MRC. Akibatnya, MRC memiliki ruang yang terbatas untuk mengendalikan atau mempengaruhi keputusan pembangunan infrastruktur air berskala besar, sehingga ketimpangan relasi kuasa antara aktor hulu dan hilir tetap berlangsung dalam pengelolaan Sungai Mekong (SOUTULLO, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mendiskusikan dinamika kekuasaan dalam manajemen Sungai Mekong yang memposisikan Tiongkok sebagai aktor utama di wilayah hulu. Ballentine (2014), misalnya, dengan jelas mengaplikasikan kerangka hydro-hegemony untuk menganalisis bagaimana keunggulan geografis dan kekuatan material Tiongkok memungkinkan kontrol yang signifikan terhadap aliran Sungai Mekong, sekaligus menyoroti betapa lemahnya Mekong River Commission (MRC) dalam menyeimbangkan ketimpangan tersebut. Studi ini menekankan praktik pengelolaan air yang bersifat asimetris dalam pengelolaan air, tetapi cenderung berfokus pada dominasi aktor hulu yang berpusat di Tiongkok (China-centric) (Ballentine, 2014). Erawati (2020), di sisi lain membahas hegemoni Tiongkok atas Sungai Mekong dalam konteks geopolitik yang lebih luas, dengan menunjukkan bagaimana

pembangunan bendungan berdampak pada negara-negara hilir seperti Vietnam dan Kamboja. Meskipun memberikan gambaran yang signifikan tentang perbedaan dalam relasi kuasa, kajian Erawati belum membahas mekanisme relasi kuasa hidrologis, yang didefinisikan oleh gagasan hidro-hegemoni.. Kedua penelitian meningkatkan pemahaman mengenai aspek kekuasaan dalam manajemen Sungai Mekong, namun masih ada ruang untuk menganalisis hubungan hulu–hilir dan tata kelola sungai lintas negara dalam kerangka analisis yang konsisten.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dimensi kekuasaan dalam pengelolaan Sungai Mekong, kajian yang mengintegrasikan secara sistematis relasi kuasa hidrologis, posisi geografis hulu–hilir, dan keterbatasan tata kelola sungai lintas negara masih relatif terbatas. Studi Ballentine (2014) menunjukkan relevansi konsep hydro-hegemony dalam konteks Mekong, namun analisisnya cenderung berfokus pada dominasi Tiongkok. Sementara itu, kajian Erawati (2020) menekankan aspek hegemoni Tiongkok dalam kerangka geopolitik yang lebih umum tanpa mengelaborasi secara spesifik mekanisme relasi kuasa hidrologis. Dengan demikian, masih terdapat ruang analitis untuk mengkaji dinamika pengelolaan Sungai Mekong melalui pendekatan yang menempatkan hydro-hegemony sebagai kerangka utama dalam membaca kontestasi kepentingan antara aktor hulu dan negara-negara Lower Mekong, khususnya dalam konteks tata kelola sumber daya air lintas negara.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan sumber daya air di Sungai Mekong dalam konteks kontestasi kepentingan antara aktor hulu dan negara-negara Lower Mekong. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana perbedaan posisi geografis hulu–hilir serta kapasitas pengelolaan sumber daya air membentuk relasi kuasa dalam pengelolaan Sungai Mekong. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah “Bagaimana praktik hydro-hegemony termanifestasi dalam pengelolaan Sungai Mekong dan bagaimana implikasinya terhadap tata kelola sungai lintas negara di kawasan Lower Mekong?”. Dengan menggunakan kerangka hydro-hegemony, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman analitis mengenai hubungan antara kontrol aliran sungai, keterbatasan kelembagaan regional, dan ketimpangan kepentingan antarnegara yang terlibat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian selanjutnya akan mengulas kerangka konseptual hydro-hegemony serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan sungai

lintas negara. Setelah itu, artikel ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dinamika pengelolaan Sungai Mekong. Bagian pembahasan kemudian mengkaji praktik hydro-hegemony dalam konteks Sungai Mekong dengan menyoroti relasi kuasa antara aktor hulu dan negara-negara Lower Mekong serta keterbatasan tata kelola regional, khususnya peran Mekong River Commission. Artikel ini ditutup dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan implikasinya bagi pengelolaan sumber daya air lintas negara.

Metode Penelitian

Kerangka hydro-hegemony dikembangkan oleh Zeitoun dan Warner (2006) sebagai respons terhadap kecenderungan studi konflik air yang terlalu menekankan perang terbuka dan mengabaikan peran ketimpangan kekuasaan. Mereka menegaskan bahwa konflik air lintas negara umumnya berlangsung dalam bentuk konflik berintensitas rendah dan bersifat laten, di mana ketiadaan perang tidak berarti ketiadaan konflik. Sebagaimana dinyatakan secara eksplisit, “the absence of war does not mean the absence of conflict” (Zeitoun & Warner, 2006, hlm. 441). Dengan demikian, analisis konflik air perlu diarahkan pada proses politik yang menentukan siapa yang mengontrol sumber daya air, melalui mekanisme apa, dan dengan konsekuensi apa bagi aktor lain yang terlibat.

Zeitoun dan Warner mendefinisikan hydro-hegemony sebagai bentuk hegemoni di tingkat daerah aliran sungai yang dicapai melalui strategi pengendalian sumber daya air, khususnya resource capture, containment, dan integration (Zeitoun & Warner, 2006, hlm. 437). Strategi-strategi tersebut dijalankan melalui berbagai taktik, seperti pembangunan infrastruktur berskala besar, tekanan politik, perjanjian internasional, serta konstruksi wacana pengetahuan yang melegitimasi tatanan yang ada. Kerangka ini menempatkan air bukan sebagai objek teknis semata, melainkan sebagai medium politik yang memungkinkan aktor dominan mempertahankan kontrol atas aliran dan manfaat sumber daya air.

Berbeda dengan pendekatan deterministik geografis, kerangka hydro-hegemony menekankan bahwa posisi hulu–hilir tidak secara otomatis menentukan dominasi. Zeitoun dan Warner menegaskan bahwa kekuasaan dalam dimensi material, institusional, dan diskursif merupakan faktor utama yang memungkinkan aktor tertentu mengonversi posisi geografis menjadi kontrol efektif atas sumber daya air (Zeitoun & Warner, 2006, hlm. 451). Mereka menyatakan bahwa “power is the prime determinant enabling the successful execution of water resource control strategies”. Dengan demikian, negara yang memiliki kapasitas ekonomi, teknologi, dan politik yang lebih besar memiliki

peluang lebih besar untuk membentuk hasil kompetisi sumber daya air, bahkan dalam konteks kerja sama formal.

Salah satu strategi utama dalam hydro-hegemony adalah resource capture, yang dilakukan melalui penciptaan “fakta di lapangan” seperti pembangunan bendungan besar dan proyek rekayasa air berskala masif. Zeitoun dan Warner menjelaskan bahwa strategi ini memungkinkan negara hegemon mengubah realitas hidro-politik dengan menciptakan kondisi yang sulit dibalik oleh aktor lain (Zeitoun & Warner, 2006, hlm. 444–445). Mereka menekankan bahwa negara yang mampu merencanakan, membangun, dan mengoperasikan infrastruktur besar memiliki kemampuan fisik untuk mengubah hidrogeologi sungai, sehingga menciptakan konfigurasi kekuasaan baru yang menguntungkan pihak pembangun.

Selain tindakan unilateral, hydro-hegemony juga dapat dipertahankan melalui strategi containment, yaitu upaya melibatkan aktor yang lebih lemah dalam mekanisme kerja sama yang bersifat asimetris. Zeitoun dan Warner menjelaskan bahwa perjanjian dan institusi internasional sering kali dimanfaatkan untuk menstabilkan status quo yang menguntungkan aktor dominan, terutama dalam konteks lemahnya penegakan hukum internasional (Zeitoun & Warner, 2006, hlm. 445–446). Mereka menegaskan bahwa ketiadaan otoritas internasional yang efektif membuat hasil pengelolaan sungai lintas negara lebih ditentukan oleh relasi kekuasaan daripada prinsip hukum seperti equitable and reasonable use.

Kerangka hydro-hegemony menyediakan alat analitis yang komprehensif dan dapat diuji untuk memahami dinamika Sungai Mekong, di mana tidak terjadi perang terbuka, tetapi terdapat ketimpangan distribusi manfaat dan kontrol aliran air. Zeitoun dan Warner menyatakan bahwa “the hydro-hegemon can establish the form of interaction over transboundary waters that it prefers” (Zeitoun & Warner, 2006, hlm. 455). Pernyataan ini relevan untuk membaca relasi antara aktor hulu dan negara-negara Lower Mekong, serta untuk menganalisis bagaimana stabilitas institusional tidak selalu berarti keadilan distribusi. Dengan demikian, hydro-hegemony memungkinkan analisis Sungai Mekong sebagai arena konflik struktural yang berlangsung secara senyap, tetapi berdampak nyata terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat hilir.

Meskipun terdapat berbagai pendekatan dalam menganalisis konflik sumber daya air lintas negara, seperti perspektif hukum internasional atau kerja sama kelembagaan, penelitian ini secara sadar memfokuskan diri pada kerangka hydro-hegemony. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan praktik kekuasaan yang berlangsung di balik stabilitas kerja sama

formal dan ketiadaan konflik terbuka. Dengan menempatkan relasi kuasa sebagai variabel utama, hydro-hegemony memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap ketimpangan distribusi manfaat sumber daya air yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif atau institusional semata.

Hasil dan Pembahasan

Konflik sumber daya di Sungai Mekong berawal dari pertentangan antara kebutuhan energi negara hulu dan kebutuhan pangan negara hilir. Negara hulu yang ditempati oleh Tiongkok dan Laos menjadikan sungai sebagai basis pembangunan energi melalui bendungan besar, sementara negara hilir seperti Kamboja dan Vietnam bergantung pada stabilitas aliran air untuk kegiatan perikanan dan irigasi pertanian yang penduduknya lakukan. Dinamika ini kemudian mengakibatkan ketidakseimbangan struktural di mana pembangunan energi menghasilkan tekanan ekologis yang memengaruhi jutaan masyarakat di hilir (Carl, 2022).

Dalam kerangka hydro-hegemony dijelaskan bahwa negara yang menempati posisi hulu memiliki keunggulan untuk mengatur aliran air dan menentukan politik sungai (Zeitoun & Warner, 2006). Di dalam konteks penelitian ini, Tiongkok merupakan negara yang diuntungkan tersebut, dengan lebih dari 86.000 bendungan yang telah dibangun secara nasional dan kapasitas hydropower mencapai 350 GW, Tiongkok menjadi produsen listrik tenaga air terbesar di dunia (SOUTULLO, 2019). Di Mekong sendiri, Tiongkok sudah membuat 10 bendungan dan menargetkan 9 tambahan lagi hingga tahun 2030 (Benjamin, 2019).

Rangkaian bendungan yang dibangun Tiongkok disebut sebagai Lancang cascade dan berpotensi menahan lebih dari 50 persen sedimen tahunan dan mengatur hingga 70 persen debit air saat musim kemarau. Kondisi ini memberi Tiongkok kekuasaan hidrologis yang besar terhadap negara hilir, terutama untuk Vietnam dan Kamboja (Heinrich Böll Stiftung, n.d.). Selain kontrol fisik, Tiongkok juga memanfaatkan investasi PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) sebagai bagian dari national interest nya yaitu proyek Belt and Road Initiative (BRI), memperluas pengaruhnya dalam kerja sama sub-regional Mekong. Dalam kerangka hydro-hegemony, pembangunan ini dapat dipahami sebagai bentuk resource capture, yaitu penciptaan kontrol fisik atas aliran air yang menghasilkan kekuasaan struktural atas negara-negara hilir.

Di sisi lain, ada negara Laos sebagai sub-hegemon energi. Laos memanfaatkan posisinya di Mekong dengan mengembangkan "Battery of Southeast Asia". Laos telah mengoperasikan puluhan PLTA (Pembangkit Listrik

Tenaga Air) dan merencanakan proyek lainnya. Proyek bendungan besar seperti Xayaburi yang memiliki kekuatan sampai 1.285 MW dan Don Sahong sebagian besar dibiayai oleh perusahaan dan bank asal Thailand, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang (SOUTULLO, 2019). Namun ketergantungan pada modal luar negeri menciptakan risiko bagi Laos. Akses modal membuat pendirian PLTA berlangsung cepat, tetapi negara menanggung risiko secara ekologis dan sosial, termasuk relokasi penduduk, rusaknya habitat ikan, serta ancaman keselamatan bendungan. Contohnya yang terjadi di tahun 2018 silam, runtuhnya bendungan Xepian-Xe Nam Noy menewaskan puluhan orang dan membuat ribuan warga meninggalkan tempat tinggalnya (Petersen, 2018).

Kendati demikian, pembangunan PLTA terus dilakukan karena Laos sangat mengandalkan ekspor listrik sebagai pemasukan utama, bahkan telah menyepakati penjualan 9.000 MW listrik ke Thailand di tahun 2020 dan 5.000 MW ke Vietnam untuk tahun 2030 (SOUTULLO, 2019). Posisi Laos menunjukkan bahwa hydro-hegemony tidak selalu bersifat tunggal, melainkan dapat bersifat berlapis (layered), di mana sub-hegemon beroperasi di bawah struktur hegemon utama.

Dampak dominasi negara hulu ini sangat dirasakan oleh Thailand. Di negara ini, efek pembangunan bendungan terlihat jelas di wilayah timur laut yang sangat bergantung pada Sungai Mekong untuk irigasi dan perikanan lokal. Fluktuasi debit air akibat operasi bendungan Jinghong di Tiongkok dan Xayaburi di Laos menyebabkan permukaan air turun drastis, termasuk di tahun 2019 ketika ketinggian air mencapai titik terendahnya dalam satu abad dan mengeringkan sebagian besar tepian sungai (Angskul, 2019). Kondisi ini pada akhirnya mengganggu penanaman padi yang dilakukan di Provinsi Nong Khai dan Nakhon Phanom, menurunkan hasil perikanan, serta menghambat transportasi sungai yang menjadi salah satu jalur penting untuk kegiatan ekonomi masyarakat lokal (Pattanapong, 2019).

Thailand juga dihadapi dengan tekanan akan ketergantungannya dengan energi impor dari Laos. Tahun 2020, Thailand membeli lebih dari 5.720 MV listrik dari Laos, menjadikannya konsumen terbesar energi PLTA di kawasan (Weatherby, 2022). Situasi ini menaruh Thailand pada posisi yang sulit karena negara tersebut menjadi pemegang dana utama bagi proyek proyek PLTA di Laos termasuk Xayaburi dan Don Sahong, namun justru ikut merasakan dampak negatif dari perubahan aliran sungai yang ditimbulkan oleh bendungan bendungan tersebut. Di satu sisi, Thailand membutuhkan energi yang semakin tinggi dan di sisi lain masyarakat yang hidup di sepanjang Mekong justru merugi.

Pemerintah Thailand saat ini sudah mulai mengarahkan kebijakan energinya menuju sumber alternatif, salah satunya melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung berkapasitas 2,7 GW (Petrova, 2019). Kendati demikian, ketergantungan terhadap Mekong dan impor listrik Laos masih tidak bisa digantikan karena kemampuan jaringan kelistrikan Thailand belum memadai untuk menggantikan pasokan tersebut. Konsekuensinya, walaupun dampak ekologis yang dirasakan Thailand tidak sebesar yang dialami Vietnam atau Kamboja, posisinya sebagai pendukung investasi PLTA dan sekaligus pihak yang mendapatkan efek negatif menjadikan Thailand aktor penting dalam dinamika konflik sumber daya di Mekong. Keterlibatan Thailand sebagai investor sekaligus pihak terdampak mencerminkan mekanisme containment, di mana aktor yang dirugikan tetap terikat dalam struktur yang menguntungkan hegemon.

Selain Thailand, Vietnam menjadi negara yang menghadapi dampak paling kuat pertama adalah Vietnam, yang bergantung pada Delta Mekong untuk 50 persen produksi beras nasional, 65 persen kegiatan akuakultur, dan 95 persen ekspor beras. Kehilangan sedimen dari hulu membuat delta menurun evalasinya sekitar 1-2 cm per tahun, meningkatkan intrusi air laut yang kini telah merambah lebih dari 100 km ke daratan pada musim kemarau. Kondisi ini secara langsung mengancam kegiatan pertanian serta ketahanan pangan negara (Soukhaphon, 2021).

Kondisi serupa terjadi di Kamboja, di mana perubahan aliran sungai menyebabkan gangguan pada siklus Tonle Sap, danau yang secara historis menjadi pusat peradaban Angkor dan menopang 60 persen produksi ikan tawar. Banjir tahunan di Tonle Sap kini telah berkurang sepertiga volume normalnya, dan biomassa ikan menurun sampai angka 32 persen akibat tertahannya arus dan migrasi ikan oleh bendungan Don Sahong (Arias, 2013). Hal ini juga langsung berdampak ke mata pencaharian lebih dari 1,2 juta penduduk pedesaan yang bergantung pada perikanan dan pertanian.

Vietnam dan Kamboja menempati posisi paling rentan dalam struktur pengelolaan Sungai Mekong karena ketergantungan tinggi terhadap stabilitas aliran air dan sedimentasi dari wilayah hulu. Sebagai negara hilir, kedua negara ini mengalami dampak langsung dari pembangunan bendungan di bagian hulu dan tengah sungai. Dalam perspektif hydro-hegemony, kerentanan Vietnam dan Kamboja tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis hidrologis, melainkan merupakan konsekuensi dari ketimpangan relasi kuasa yang membatasi kemampuan mereka untuk memengaruhi keputusan pengelolaan sungai lintas negara. Dengan demikian, posisi Vietnam dan Kamboja mencerminkan bagaimana negara-negara hilir berada dalam struktur hydro-hegemony yang

memaksa mereka menanggung biaya lingkungan dan sosial yang tinggi tanpa memiliki kontrol yang proporsional atas sumber daya air yang sangat menentukan keberlanjutan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Tabel 1. Perbandingan Pemanfaatan Hidroenergi Sungai Mekong

NEGARA	PERAN UTAMA	DAMPAK UTAMA
Tiongkok	Hegemon Hulu	Kontrol atas aliran dan kekuasaan hidrologis
Laos	Eksportir Energi	Resiko ekologis dan kerusakan habitat ikan
Thailand	Konsumen dan Investor	Kekeringan di wilayah Timur Laut
Vietnam	Terdampak Hilir	Intrusi air laut dan kehilangan sedimen
Kamboja	Terdampak Hilir	Penurunan populasi ikan di Tonle Sap

Tabel diatas memperlihatkan pola asimetri yang konsisten antara peran negara-negara riparian dan distribusi dampak pemanfaatan hidroenergi di Sungai Mekong. Aktor yang memiliki kapasitas pengendalian aliran di wilayah hulu menempati posisi paling dominan dalam struktur pengelolaan sungai, sementara negara-negara di bagian tengah dan hilir cenderung beroperasi dalam kerangka peran yang lebih terbatas dan reaktif. Distribusi peran tersebut berimplikasi pada pergeseran beban risiko ekologis dan sosial ke wilayah hilir, yang menanggung konsekuensi lingkungan secara tidak proporsional dibandingkan dengan tingkat kontrol yang dimiliki. Pola ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Sungai Mekong tidak berlangsung dalam relasi yang setara, melainkan dibentuk oleh struktur relasi kuasa yang memungkinkan aktor tertentu memperoleh manfaat strategis sekaligus mengalihkan dampak negatif ke aktor lain.

Perubahan yang terjadi di sepanjang Sungai Mekong tidak berhenti pada persoalan lingkungan. Dampaknya menyebar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pada akhirnya sampai pada isu keamanan kawasan. Selama lebih dari satu dekade, debit air di musim kemarau beberapa kali turun jauh dari kondisi alaminya, bahkan di beberapa titik mencapai penurunan hingga 40 persen dan hilangnya sedimen akibat deretan bendungan hulu membuat daerah

hilir kehilangan fondasi ekologisnya (Soukhaphon, 2021). Ratusan ribu keluarga yang memiliki mata pencaharian berupa nelayan dan bertani mulai merasakan ketidakpastian pendapatan, terutama di Kamboja dan Vietnam, di mana intrusi air asin pada saat ini sudah sampai 100 km ke daratan. Situasi ini membuka ruang bagi tekanan sosial yang lebih besar, yaitu perpindahan penduduk, naiknya biaya produksi pangan, dan meningkatnya kerentanan penduduk pesisir.

Selain berdampak ke aktivitas mata pencaharian, pengelolaan Mekong juga menimbulkan perseteruan antarnegara. Vietnam dan Kamboja berulang kali menyampaikan keberatan atas pembangunan bendungan di Laos yang dinilai mengancam perikanan, irigasi, dan stabilitas ekosistem mereka (Commission, 2014). Kamboja secara terbuka menolak kelanjutan proyek Don Sahong pada 2014 karena dinilai dapat menghambat migrasi ikan, sementara Vietnam menuntut Laos menunda bendungan Xayaburi sampai ada kajian dampak lingkungan yang memadai, namun protes ini tidak membuahkan perubahan berarti (Giovannini, 2018). Ketegangan dengan Tiongkok juga muncul ketika beberapa negara hilir menuding bahwa penurunan air ekstrem pada 2019 terjadi akibat operasi bendungan, bukan hanya akibat kekeringan, sehingga Tiongkok dianggap tidak transparan dalam berbagi data tentang aliran sungai (Eyler, 2020).

Menurut laporan kebijakan yang ditulis oleh Jorge Soutullo (2019), ketidakmampuan Vietnam dan Kamboja untuk menolak atau secara efektif memengaruhi pembangunan bendungan di hulu Sungai Mekong adalah akibat dari struktur kelola Sungai Mekong yang tidak konsisten. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Soutullo, Tiongkok adalah “the dominant power in the sub-region, controlling the Mekong’s headwaters” dan secara de facto menjalankan bentuk hydro-hegemony melalui penguasaan wilayah hulu serta kapasitas infrastruktur bendungan berskala besar. Posisi ini memungkinkan Tiongkok dan kelompoknya yang berafiliasi untuk mengambil keputusan sepihak terkait pengelolaan aliran sungai, sementara negara-negara hilir seperti Vietnam dan Kamboja hanya dapat menangani kerusakan, terutama dalam bentuk degradasi lingkungan, gangguan perikanan, dan infiltrasi air asin di Delta Mekong.

Selain itu, Soutullo menyoroti bahwa Komite Sungai Mekong (MRC) belum mampu berfungsi sebagai mekanisme multilateral yang efektif untuk menyeimbangkan kepentingan hulu dan hilir. Meskipun didirikan untuk “defend the sustainable development of the Mekong River and to plan its future”, keberhasilan MRC secara signifikan terhambat oleh ketidakhadiran Tiongkok dan Myanmar sebagai anggota penuh, yang “mitigates and erodes the effective dialogue of the MRC on the management of the River”. Selain itu, Soutullo

menekankan bahwa ketiadaan mekanisme implementasi yang mengikat menyebabkan rekomendasi dan proses konsultasi MRC tidak memiliki daya paksa terhadap proyek bendungan strategis, khususnya di wilayah hulu dan arus utama sungai.

Dalam konteks tersebut, laporan ini menyimpulkan bahwa MRC cenderung berfungsi sebagai forum untuk memperkuat hubungan antarnegara, daripada memperbaiki ketidaksesuaian kekuasaan. Soutullo secara eksplisit menyatakan bahwa tanpa keterlibatan penuh negara-negara hulu dan tanpa mandat implementatif yang kuat, tata kelola multilateral di Mekong “cannot provide downstream states such as Vietnam and Cambodia with sufficient leverage to protect their interests”. Hasil ini memperkuat argumen bahwa ketidakmampuan Vietnam dan Kamboja untuk menolak pembangunan bendungan bukanlah kesalahan diplomatik semata, sebaliknya itu adalah konsekuensi struktural dari konfigurasi hydro-hegemony yang dilembagakan melalui mekanisme kerja sama regional yang asimetris.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa dinamika pengelolaan Sungai Mekong tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis lingkungan atau pembangunan energi, melainkan sebagai manifestasi relasi kuasa yang terstruktur di sepanjang aliran sungai. Kontrol aliran air oleh aktor hulu melalui pembangunan bendungan berskala besar telah membentuk pola distribusi manfaat dan risiko yang tidak seimbang, di mana keuntungan ekonomi dan strategis terkonsentrasi pada aktor tertentu, sementara beban ekologis dan sosial dialihkan ke negara-negara di bagian hilir. Keterbatasan mekanisme tata kelola regional, khususnya dalam kerangka kerja Mekong River Commission, semakin memperkuat kondisi tersebut dengan menyediakan ruang yang terbatas bagi negara-negara terdampak untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa stabilitas hubungan antarnegara di kawasan Mekong tidak meniadakan keberadaan konflik struktural, melainkan mencerminkan beroperasinya praktik hydro-hegemony yang berlangsung secara senyap namun berdampak nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat di kawasan Lower Mekong.

Kesimpulan

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa praktik hydro-hegemony dalam pengelolaan Sungai Mekong termanifestasi melalui kemampuan aktor hulu, khususnya Tiongkok, untuk mengendalikan aliran sungai dan membentuk pola interaksi yang menguntungkan kepentingannya. Kontrol tersebut dijalankan melalui pembangunan bendungan hidroelektrik berskala

besar yang memungkinkan Tiongkok mengatur debit air, sedimentasi, dan distribusi manfaat ekonomi dari Sungai Mekong. Dalam prosesnya, Laos berperan sebagai aktor pendukung yang memanfaatkan posisi geografis dan potensi hidroenergi untuk mengembangkan strategi pembangunan berbasis ekspor listrik. Akibatnya, negara-negara hilir seperti Vietnam dan Kamboja menanggung dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang tidak proporsional, meskipun memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keberlanjutan aliran Sungai Mekong. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Mekong tidak berlangsung dalam hubungan yang setara, melainkan dalam struktur relasi kuasa yang asimetris antara aktor hulu dan hilir.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep hydro-hegemony dengan menunjukkan bahwa dominasi dalam tata kelola sungai lintas negara tidak selalu dijalankan oleh satu aktor tunggal. Dalam konteks Sungai Mekong, ditemukan pola relasi yang dapat dipahami sebagai layered hydro-hegemony, yaitu situasi ketika hegemon utama (Tiongkok) memperoleh dan mempertahankan kontrol melalui keterlibatan aktor regional lain yang berperan sebagai sub-hegemon (Laos). Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik hydro-hegemony tidak hanya bergantung pada posisi geografis hulu, tetapi juga pada kemampuan membangun jaringan ekonomi, investasi, dan kerja sama energi yang memperkuat struktur dominasi di tingkat kawasan. Dengan demikian, artikel ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana relasi kuasa hidrologis dapat beroperasi secara berlapis melalui kombinasi kontrol fisik, ekonomi, dan kelembagaan.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola multilateral Sungai Mekong agar mampu mengurangi ketimpangan antara negara hulu dan hilir. Mekong River Commission (MRC) perlu didorong untuk memiliki mekanisme koordinasi yang lebih efektif, transparansi data hidrologi yang lebih kuat, serta keterlibatan yang lebih substansial dari seluruh negara riparian, termasuk Tiongkok. Selain itu, negara-negara Lower Mekong perlu memperkuat posisi tawar kolektif mereka dalam isu pengelolaan sumber daya air lintas negara, terutama terkait pembangunan bendungan baru dan mekanisme mitigasi dampak lingkungan. Tanpa reformasi tata kelola yang lebih inklusif dan berkeadilan, pengelolaan Sungai Mekong berpotensi terus mereproduksi ketimpangan distribusi manfaat dan risiko yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

- Angskul, T. (2019). Mekong water level lowest in 50 years. <https://reliefweb.int/report/thailand/mekong-water-level-lowest-50-years?>
- Arias, M. E. (2013). Impacts of Hydrological Alterations in the Mekong Basin to the Tonle Sap Ecosystem.
- Ballentine, P. (2014). HYDRO-HEGEMONY IN THE MEKONG BASIN: THE STRONG DAM WHERE THEY CAN, THE WEAK SUFFER WHAT THEY MUST (pp. 1–24).
- Benjamin, Z. (2019). Are We Seeing the Mekong River's 'Last Days'? A book review of Last Days of the Mighty Mekong, Brian Eyler, Zed 2019. <https://thediomat.com/2019/03/are-we-seeing-the-mekong-rivers-last-days/>
- Carl, M. (2022). The Political Ecology of Large Hydropower Dams in the Mekong Basin: A Comprehensive Review. *Annual Water Alternative Review*, 15(2), 1–39.
- Commission, M. R. (2014). Prior Consultation Process for the Don Sahong Hydropower Project. Vientiane: MRC Secretariat. https://awsassets.panda.org/downloads/don_sahong_brief___final___updated_april2014_.pdf
- Eyler, B. (2020). New Evidence: How China Turned Off the Tap on the Mekong River. <https://www.stimson.org/2020/new-evidence-how-china-turned-off-the-mekong-tap/>
- Giovannini, G. (2018). Power and Geopolitics along the Mekong: The Laos–Vietnam Negotiation on the Xayaburi Dam. *Sagepub*, 37(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/186810341803700203>
- Heinrich Böll Stiftung, W. and I. I. for S. D. (n.d.). Rethinking Investments in Natural Resources: China's Emerging Role in the Mekong Region.
- Panu, W. U. (2019). Missing Mekong waters rouse suspicions of China. *The Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-mekong-river/missing-mekong-waters-rouse-suspicions-of-china-idUSKCN1UK19Q/?il=0>
- Parameswaran, P. (2019). The Mekong in US Asia Strategy: Opportunities and Challenges The subregion is arguably where freedom and openness are

- under the greatest challenge. <https://thediplomat.com/2019/07/the-mekong-in-us-asia-strategy-opportunities-and-challenges/>
- Pattanapong, S. (2019). Mekong river in Nakhon Phanom “lowest in almost 100 years.” <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1716287/mekong-river-in-nakhon-phanom-lowest-in-almost-100-years?>
- Petersen, H. E. (2018). Laos dam collapse: work continues on huge projects despite promised halt. <https://www.theguardian.com/world/2018/aug/21/laos-dam-collapse-work-continues-on-huge-projects-despite-promised-halt>
- Petrova, V. (2019). Thai utility plans building 2.7-GW floating PV farm. <https://renewablesnow.com/news/thai-utility-plans-building-2-7-gw-floating-pv-farm-report-645486/?>
- Soukhaphon, A. (2021). The Impacts of Hydropower Dams in the Mekong River Basin: A Review. MDPI, 13(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/w13030265>
- SOUTULLO, J. (2019). The Mekong River: geopolitics over development , hydropower and the environment (Issue November).
- Weatherby, C. (2022). Alternative Development Pathways for Thailand’s Sustainable Electricity Trade with Laos. <https://www.stimson.org/2022/alternative-development-pathways-for-thailands-sustainable-electricity-trade-with-laos/?>
- Zeitoun, M., & Warner, J. (2006). Hydro-hegemony – a framework for analysis of trans-boundary water conflicts. 8, 435–460. <https://doi.org/10.2166/wp.2006.054>